



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN MOBIL DENGAN
MODUS OPERANDI SEWA MENYEWA BARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Heri Kiswanto
221003742019324

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN
MODUS OPERANDI SEWA MENYEWA BARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
HERI KISWANTO
NPM : 221003742019324

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. WIDAYANTI, SE. SH. MH
NUPTK : 9059748649230153

Anggota,

DR. SRI WULANDARI, SH.,MHUM.,MKN
NUPTK : 9562743644230083

Anggota,

PROF. DR. SETIYOWATI, SH.,MH
NUPTK :3241741642230113



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatas Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian kriminologi.....	10
B. Pengertian Tindak Pidana	14
C. Tinjauan Penggelapan	23
D. Jenis-Jenis Penggelapan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Tipe Penelitian	28
B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Metode Penyajian Data	32
F. Metode Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	36
A. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil dengan Modus Sewa Menyewa di Kabupaten Rembang.....	36
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dengan Modus Sewa Menyewa Barang Di Kabupaten Rembang	41
C. Upaya hukum dan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penggelapan mobil dengan modus sewa menyewa di Kabupaten Rembang	47
1. Upaya Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Mobil .	47
2. Hambatan yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum.....	50
3. Hambatan dalam Proses Peradilan	53
4. Analisis Penulis terhadap Upaya dan Hambatan.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
Daftar Pustaka.....	63

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan mobil dengan modus operandi sewa menyewa barang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pemilik kendaraan. Modus ini dilakukan dengan cara pelaku menyewa mobil secara sah berdasarkan perjanjian sewa menyewa, namun kemudian menguasai kendaraan tersebut secara melawan hukum dengan menjual, menggadaikan, atau tidak mengembalikannya kepada pemilik. Permasalahan ini menimbulkan persoalan hukum terkait pemenuhan unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan mobil dengan modus operandi sewa menyewa barang serta mengkaji upaya penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penggelapan mobil dengan modus sewa menyewa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan, yaitu adanya penguasaan barang secara sah yang kemudian disalahgunakan secara melawan hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai hambatan, antara lain kesulitan pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*), perbedaan penafsiran antara wanprestasi perdata dan tindak pidana, serta keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan aparat penegak hukum serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum perjanjian sewa menyewa guna mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan mobil.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan Mobil, Sewa Menyewa, KUHP, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Car embezzlement, which uses the modus operandi of "renting goods," is an increasingly common crime that causes losses to vehicle owners. This method involves the perpetrator legally renting a car under a rental agreement, but then unlawfully taking possession of the vehicle by selling, pawning, or failing to return it to the owner. This issue raises legal challenges related to fulfilling the elements of the crime of embezzlement as stipulated in Article 372 of the Criminal Code (KUHP).

This study aims to analyze the legal perspective of the crime of car embezzlement, which uses the modus operandi of "renting goods," and to examine law enforcement efforts and the obstacles faced by law enforcement officials in handling it. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively.

*The results indicate that the act of car embezzlement, which uses the modus operandi of "renting goods," meets the elements of the crime of embezzlement, namely the legal possession of goods and their subsequent unlawful misuse. However, various obstacles remain in law enforcement practice, including difficulties in proving the element of malicious intent (*mens rea*), differing interpretations of civil and criminal breaches of contract, and limited law enforcement facilities and infrastructure. Therefore, assertive law enforcement officers and increased public understanding of the legal aspects of rental agreements are needed to prevent the crime of car embezzlement.*

Keywords: Crime, Car Embezzlement, Rental, Criminal Code, Law Enforcement